

Urgensi Literasi Digital dalam Penguatan Kapabilitas *Critical Thinking* terhadap Pemilih Pemula

Rahmania¹, Zulfikar M²,

¹² Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:
Diterima:
Disetujui:

Kata kunci:

Literasi digital
Berpikir kritis
Pemilih pemula

Keywords :

Digital literac
Critical thinking
First-time voters

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran penting literasi digital dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis di kalangan pemilih pemula. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, pemilih pemula harus menghadapi berbagai informasi yang membutuhkan kemampuan analitis untuk mengevaluasi kebenaran dan relevansinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan analisis literatur. Penelitian menunjukkan bahwa literasi digital yang memadai berperan penting dalam membekali pemilih pemula dengan kemampuan berpikir kritis yang dibutuhkan untuk mengelola informasi politik secara efisien. Literasi digital memampukan pemilih pemula untuk mengenali berita palsu, propaganda, serta informasi yang menyesatkan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dalam pemilu. Penelitian ini menekankan perlunya integrasi pendidikan literasi digital dalam kurikulum sekolah dan program pelatihan pemilih pemula. Kesimpulannya, meningkatkan literasi digital adalah strategi penting untuk memperkuat *critical thinking* dan partisipasi politik yang cerdas di kalangan pemilih pemula.

ABSTRACT

This research discusses the important role of digital literacy in enhancing critical thinking skills among first-time voters. With the rapid development of information technology, first-time voters must confront various information that requires analytical skills to evaluate its truthfulness and relevance. This research uses a qualitative approach with a case study method, collecting data through interviews, observations, and literature analysis. Research shows that adequate digital literacy plays a crucial role in equipping first-time voters with the critical thinking skills needed to manage political information efficiently. Digital literacy empowers first-time voters to recognize fake news, propaganda, and misleading information, enabling them to make smarter decisions in elections. This research emphasizes the need for the integration of digital literacy education into school curricula and beginner voter training programs. In conclusion, enhancing digital literacy is an important strategy to strengthen critical thinking and informed political participation among first-time voters.

Pendahuluan

Demokrasi adalah sistem politik yang menempatkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, di mana pemerintahan dijalankan oleh wakil-wakil yang dipilih langsung melalui pemilihan umum. Sistem ini sangat menjunjung tinggi kesetaraan hak dan kewajiban bagi semua warga negara. Dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, warga negara dapat berpartisipasi secara langsung maupun melalui perwakilan. Warga negara memainkan peran penting dalam perkembangan dan implementasi demokrasi. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi berarti "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat."

Sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah menerapkan sistem demokrasi. Presiden bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang anggotanya dipilih oleh rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi di Indonesia berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui MPR (Tokan Pureklolon, 2021). Pemilihan umum pertama di Indonesia berlangsung pada tahun 1955, dikenal sebagai Masa Parlemerter, yang menjadi tonggak penting dalam sejarah politik negara. Pemilu ini merupakan penerapan awal demokrasi parlemerter di bawah kabinet Burhanuddin Harahap. Proses pemungutan suara pada

Korespondensi: Annisa Rahmania, annisarahmania35@gmail.com, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Ahmad dahlan, Yogyakarta, Indonesia

Copyright © 2024 Universitas Ahmad Dahlan. All Right Reserved

<http://journal.uad.ac.id/index.php/citizenship>

1955 dilakukan dalam dua tahap: pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 29 September 1955, dan anggota Dewan Konstituante pada 25 Desember 1955. Sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem proporsional. Pada periode tersebut, Indonesia dipimpin oleh Presiden Ir. Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta (Wibawa, 2022)

Menurut Prof. Miriam Budiarto, politik dapat diartikan sebagai berbagai aktivitas dalam sebuah sistem politik (negara) yang berkaitan dengan proses penentuan tujuan sistem tersebut serta pelaksanaannya. Secara sederhana, politik mencakup segala hal yang berhubungan dengan negara dan proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan (Budiarto Miriam, 2008).

Budaya politik di Indonesia sangat beragam, dengan beberapa jenis budaya politik yang dominan, seperti budaya politik parokial, subjek, dan partisipan. Budaya politik parokial merupakan jenis di mana tingkat partisipasi masyarakat dalam politik masih tergolong rendah. Menurut Moctar Masoed dan Colin McAndrew, budaya politik parokial ditandai oleh ketidaksadaran masyarakat akan keberadaan pemerintahan dan politik. Ciri utama budaya ini adalah sikap apatis terhadap politik, di mana masyarakat jarang atau bahkan tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan dan sistem politik.

Politik parokial juga bermakna keapatisan masyarakat terhadap pemerintahan dan politik. Kemudian budaya politik subjek atau kaula, biasanya budaya ini dipahami sebagai budaya politik yang dimana masyarakat sadar terhadap sistem politik dan budaya ini sejatinya sudah dapat dilaksanakan dengan mudah karena adanya kemajuan dalam sosial-ekonomi namun budaya ini juga masih belum sepenuhnya ada keaktifan dan melibatkan dalam kegiatan politik atau memberikan suara pemilihan. Kemudian Budaya Politik Partisipan yaitu masyarakat sudah memiliki kesadaran berperan aktif dalam kegiatan politik, mereka beranggapan bahwa partisipasi kecil yang mereka lakukan penting dalam keberlangsungan sistem politik negaranya. Budaya ini sudah banyak marak di masyarakat Indonesia pada umumnya. Budaya ini biasa dapat dijumpai diperkotaan atau pedesaan yang dimana informasi tentang politik sudah mudah diakses (Lisa et al., 2019).

Seiringnya perkembangan zaman Indonesia mengalami perubahan budaya politik secara signifikan yang dimana waktu sebelum orde reformasi, Indonesia cenderung menganut Budaya Politik Parokial, hal ini terjadi karena pada saat itu pers sangat dibatasi sehingga masyarakat minim akan informasi perkembangan politik pasca orde reformasi hingga dewasa ini budaya politik Indonesia lebih cenderung menganut budaya politik partisipan walaupun budaya politik parokial masih ada khususnya di daerah yang terpencil, namun mayoritas yang tersebar secara umum dimasyarakat adalah Budaya Politik Partisipan hal ini didukung dengan semakin meleknya terhadap isu-isu politik yang banyak digarap oleh kaum muda sehingga hal ini berdampak pada masyarakat secara luas (Lisa et al., 2019).

Dibandingkan dengan tahun 2014, tercatat peningkatan hampir 10 persen dalam tingkat partisipasi pada Pemilu 2019. Secara keseluruhan, partisipasi pemilih nasional pada Pemilu 2019 mencapai 81 persen, meningkat dari Pilpres 2014 yang sebesar 70 persen dan pileg 2014 yang mencapai 75 persen. Angka ini signifikan melebihi target yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara nasional, yakni sebesar 77,5 persen (Pulungan et al., 2020).

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022, pemilih dalam pemilu adalah Warga Negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau lebih, sudah menikah atau pernah menikah. Beberapa persyaratan lainnya yang harus dipenuhi untuk menjadi pemilih adalah sebagai berikut:

1. Berusia tepat 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah menikah, atau pernah menikah.
2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Berdomisili di wilayah Indonesia, dibuktikan dengan KTP elektronik.
4. Bagi pemilih yang tinggal di luar negeri, dibuktikan dengan KTP elektronik, paspor, atau Surat Perjalanan Laksana Paspor.
5. Jika pemilih belum memiliki KTP elektronik, dapat menggunakan Kartu Keluarga.
6. Tidak sedang bertugas sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Komisi Pemilihan Umum RI, n.d.).

Dilihat dari tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019, pemilih pemula menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan Pemilu 2014. Pada 2019, dari total 193 juta pemilih, 60 juta di

antaranya merupakan pemilih pemula. Hal ini mencerminkan peningkatan dibandingkan tahun 2014, di mana dari total 186 juta pemilih, 56 juta adalah pemilih pemula. Selain itu, pada Pemilu 2019, pemilih berusia 35 tahun ke bawah hampir mencapai 100 juta orang (Huljanna & Ikhsan, 2022).

Dewasa ini. Kapabilitas yang dimiliki pada pemilih pemula terhadap pengetahuan mengenai politik dan pemungutan suara untuk kemajuan bangsa dapat dikatakan belum pada tahap menakar sejauh mana kapabilitas yang dimiliki. Artinya hal itu masih perlu pengukuran standarisasi terhadap pengetahuan mengenai politik dan pemungutan suara. Cara pemikiran pemilih pemula yang belum matang dan terkesan masih labil sering dimanfaatkan. Terkadang pemikiran awam tentang politik oleh para pemilih pemula malah dijadikan point emas bagi mereka. Padahal hal itu bukan hanya sekedar tampilan. Kualitas sumber daya pengetahuan orang nantinya akan dapat mempengaruhi masa depan nusa dan bangsa. Sangat mengkhawatirkan jika penyalahgunaan orang awam terhadap haknya disalahgunakan oleh oknum tertentu. Hal inilah yang harus didasari terhadap pemilih pemula mengenai hak nya atas dirinya agar dapat bermanfaat untuk kedepannya. Melalui Literasi digital ini harapannya pemilih pemula dapat mengasah skill berpikir kritis untuk bisa selektif dalam memilih pemimpin.

Kekhawatiran terhadap penyalahgunaan hak yang dimiliki oleh pemilih pemula dapat berujung keburukan terhadap dirinya dan nasib bangsa kedepannya. Jika hal itu terus dibiarkan maka kebiasaan buruk terus tertanam pada budaya demokrasi negara tersebut nantinya akan sulit bagi pemilih pemula mencari sosok pemimpin yang akan menahkodai negara akan ada kesetimpalan dalam memutuskan suatu kebijakan jika hal itu dapat di tambal dengan baik harapannya suara suara baru dapat memberikan wajah baru untuk negara dalam pelayarannya.

Metode

Dalam penulisan ini penulis akan mengambil metode penelitian dengan metode kualitatif dengan tujuan untuk membuat gambaran, deskripsi, secara sistematis, factual dan akurat mengenai literasi digital tentang dunia perpolitikan. Metode kualitatif ini penulis rasa sangat cocok untuk variable yang kita angkat. Dengan metode ini penulis akan berfokus pemahaman mendalam mengenai pengetahuan politik terhadap pemilih pemula. Metode ini dikuatkan dengan teori pendekatan dalam memahami perilaku memilih yaitu pendekatan rasional.

Dalam penelitian sebelumnya karangan Tri wahyuni M.si dengan judul “Urgensi Literasi Media Digital Bagi Pemilih Pemula Dalam Menghadapi Pemilu 2019” lebih berfokus pada partisipasi politik pemilih pemula kemudian Dalam Penelitian ini penulis memfokuskan kajian penelitian tentang urgensi literasi digital untuk meningkatkan kapabilitas critical thinking. Kedua penelitian ini merupakan penelitian yang selaras membahas tentang urgensi literasi digital bagi pemilih pemula harapannya dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kapabilitas pemilih pemula dalam menggunakan Haknya dalam memilih dengan kritis dan selektif melalui literasi digital mengenai dunia politik.

Hasil dan Pembahasan

Pentingnya Partisipasi Politik Pada Pemilih Pemula

Memilih bukanlah keputusan yang mudah, namun tidak berpartisipasi dalam pemilihan bukanlah langkah yang bijaksana. Pemilih pemula dapat memberikan keuntungan bagi partai politik jika mereka memiliki literasi digital politik yang kuat, sehingga proses politik demokratis dapat terwujud. Berdasarkan pandangan ini, penting untuk menekankan kembali betapa pentingnya partisipasi politik dalam mewujudkan demokrasi yang sehat. Pemilih pemula seharusnya memperkaya pengetahuan mereka melalui literasi digital tentang politik, sehingga dapat menyeleksi dan membagikan opini publik dengan bijak, menghasilkan keputusan yang rasional.

Diharapkan pemilih pemula mampu memberikan kontribusi positif bagi Indonesia dan turut serta dalam memperbaiki kondisi politik saat ini. Pemilih pemula harus menyadari bahwa politik bukan hanya tentang kekuasaan, melainkan tentang memikul tanggung jawab besar untuk kepentingan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, sikap selektif sangatlah penting demi kemajuan politik negara.

Literasi Digital Sebagai Alat Untuk Meningkatkan Kapabilitas *Critical Thinking* Pemilih Pemula

Pemilih pemula memainkan peran penting dalam menentukan kualitas demokrasi yang diwujudkan melalui pemilu. Komisi Pemilihan Umum memperkirakan bahwa pada Pemilu 2024, sekitar 60% pemilih akan berasal dari kalangan muda, dengan 22% di antaranya merupakan pemilih pemula. Pemilih pemula, yang sebagian besar adalah generasi Z, aktif mencari informasi melalui media digital seperti media sosial. Dengan memanfaatkan saluran media digital yang tepat, khususnya dalam hal literasi digital terkait politik, pemilih pemula dapat terhindar dari hoaks dan lebih mampu berpikir kritis (Anshori Akhyar et al., 2023). Salah satu aspek penting dari literasi digital adalah kemampuan untuk membedakan antara fakta dan hoaks (Suryani et al., 2023).

Literasi digital merupakan salah satu indikator penting dalam pendidikan dan budaya yang dapat membentuk cara berpikir kritis dan selektif pemilih pemula. Literasi digital mencakup kemampuan berinteraksi dengan informasi hipertekstual, yaitu membaca teks non-linear dengan bantuan teknologi komputer. Istilah ini pertama kali digunakan pada 1980-an (Davis & Shaw, 2011), dan secara umum merujuk pada kemampuan berinteraksi dengan informasi digital (Bawden, 2001). Gilster (2007) kemudian memperluas konsep ini, mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan memahami dan memanfaatkan informasi dari berbagai sumber digital. Dalam era digital yang berkembang pesat, diperlukan pola pikir yang lebih sistematis dan komprehensif (Musticho et al., 2023).

Literasi digital menjadi suatu hal yang penting dalam kerangka negara demokrasi karena dapat mengoptimalkan partisipasi warga negara. Paul Mihailidis berargumen bahwa jalan untuk mencapai keterlibatan masyarakat yang aktif dan kuat di abad ke-21 ini adalah literasi media atau literasi digital. Salah satu yang menentukan kualitas demokrasi adalah penerimaan informasi yang baik, hal ini dapat meningkatkan kemampuan warga negara khususnya pemilih pemula dalam menganalisis, menginterpretasi, dan menggunakan media yang akan memberikan mereka pengetahuan yang lebih memadai lagi sebagai pemilih pemula (Rianto et al., 2019).

Media sosial telah menjadi alat penting dalam proses berpolitik, seperti yang diungkapkan oleh Wahyuni (2013). Melalui media sosial, masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengungkapkan pendapat mereka. Komunikasi yang terjadi pun bersifat non-linier, sepenuhnya berada di tangan pengguna (Wahyuti & Si, 2019). Literasi digital juga menawarkan bentuk baru dalam aktivitas politik. Hal ini dapat berfungsi sebagai terobosan dalam mengorganisasi aksi, protes, dan gerakan sosial. Publik dapat berpartisipasi secara langsung dan berbagi informasi dengan orang-orang yang mereka percayai, seperti teman dan keluarga (Wahyuti & Si, 2019).

Dengan meningkatkan literasi politik, khususnya literasi digital di kalangan pemilih pemula, pemilu diharapkan menjadi lebih inklusif, transparan, dan mampu mencerminkan kehendak rakyat. Literasi digital tentang politik merupakan salah satu kunci untuk menciptakan pemilu yang bermartabat dan memperkuat demokrasi (Rasyid, 2023). Pada masa kini, penggunaan Digital Literasi telah dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk kepentingan berpolitik karena keunggulan yang mampu menyampaikan informasi secara serentak kepada banyak orang secara lebih mudah dan lebih murah. Lewat literasi digital pun pemilih pemula dapat berselektif dalam menentukan pilihannya yang kemudian dapat memberikan keluasaan dalam mencari informasi tentang dinamika politik.

Menurut survei yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo dan Katadata, memperlihatkan bahwa Indeks literasi digital di Indonesia berada di angka 3,49 dari skala 1-5. Hasil tersebut menunjukkan Indonesia berada dalam kategori literasi digital pada tingkat sedang, namun terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 3,46. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat literasi digital di Indonesia belum mencapai status literasi yang maksimal (Pauziah & Muthiah, 2023). Kenyataannya Literasi digital merupakan alat yang terbaik untuk mengasah segala informasi dalam hal ini mengenai politik negara.

Di Indonesia, saat ini terdapat beberapa media digital seperti platform media sosial yang menyediakan literasi digital tentang politik. Media digital seperti sosial media, video online, maupun situs berita dapat memberikan informasi dan pemahaman tentang isu-isu sosial politik guna mengasah *critical thinking* (Asbari & Prasetya, 2021). Platform tersebut di antaranya ada Instagram, X, Tiktok, dan lain-lain. Instagram yang merupakan aplikasi yang diandrungi oleh masyarakat khususnya mahasiswa yang notabenehnya merupakan pemilih pemula, terdapat beberapa *account* yang memang membahas tentang dunia sosial dan politik seperti Narasi

Newsroom, Tirto.id, KPU Republik Indonesia, Kompas.com dan lain-lain. Dengan mengikuti *account-account* yang berisi pembahasan politik tersebut pemilih pemula bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang lebih banyak lagi tentang politik. Juga, dapat mengasah skill berpikir kritis untuk bisa memilah informasi seputar politik dan pemilu yang akan mendatang agar bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mendapatkan keputusan memilih yang selektif dan rasional.

Media- media digital dapat dijadikan sebagai ruang untuk diskusi publik tentang politik dengan mengkritisi informasi-informasi politik yang diterimanya serta memberikan komentar yang positif, membangun, dan tidak memecah belah dengan berkomentar dengan kalimat yang mengandung SARA. Kemampuan literasi digital ini sangat penting bagi para pemilih pemula untuk bisa menguatkan kapabilitas *critical thinking* yang mereka miliki (Wahyuti & Si, 2019). Selain upaya tersebut, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi digital dengan menerapkan ide-ide dari Potter (2004: 378). Pertama, mengembangkan kesadaran akan keterbukaan informasi dengan memilih sumber informasi faktual dan dapat dipercaya. Kedua, terus memperkaya diri dengan pengetahuan untuk menambah wawasan. Ketiga, membandingkan informasi yang sama dari satu platform media dengan platform media lainnya untuk mendapatkan banyak perspektif agar tidak salah persepsi. Keempat, mempertimbangkan pendapat pribadi apakah sudah masuk akal dan rasional. Terakhir, membiasakan budaya verifikasi dan secara proaktif mengoreksi misinformasi yang beredar agar tidak semakin meluas yang mengakibatkan kerisauan di kemudian hari (Rizki Sabrina, 2018)

Dengan memiliki kemampuan literasi digital dan *critical thinking* yang baik diharapkan dengan adanya literasi digital tentang politik bisa membentengi pemilih pemula agar tidak termakan berita hoax yang marak beredar menjelang pemilu sehingga mereka bisa membuat keputusan yang rasional untuk memilih seorang pemimpin bangsa (Wahyuti & Si, 2019). Penting untuk dipahami bahwa literasi digital tidak hanya sebatas kemampuan menggunakan internet atau fitur-fitur yang tersedia, melainkan lebih pada kemampuan untuk mengelola dan memilah informasi. Di era Revolusi Industri 4.0, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat mengakibatkan penyebaran informasi secara masif tanpa adanya filter yang memadai. Dengan itu perlunya pikiran *critical (kritis menyikapi konten)* dan *selective (menyaring masuknya konten)* dalam menerima informasi harus selalu diterapkan (Arizal et al., 2021).

Dampak Positif Dari Berfikir Kritis Bagi Pemilih Pemula

Pemahaman dan penerapan berpikir kritis sangat penting bagi pemilih pemula dalam membuat keputusan yang rasional dan selektif. Berpikir kritis mencakup kemampuan untuk menganalisis informasi dan argumen, terutama bagi pemilih pemula yang sering dihadapkan pada beragam informasi politik yang kompleks. Kemampuan ini menjadi dasar yang esensial dalam membentuk pandangan dan keputusan mereka. Seseorang yang berpikir kritis cenderung memiliki sikap skeptis, terbuka, serta menghargai kejujuran dan beragam pendapat. Mereka juga menghargai kejelasan dan akurasi, serta mampu mencari sudut pandang yang berbeda dan mengubah pandangannya jika diperlukan (Prameswari et al., 2024).

Dampak positif dari berpikir kritis antara lain:

1. Mudah memahami sudut pandang orang lain
2. Pemilih pemula cenderung memiliki pola pikir yang lebih fleksibel, sehingga lebih mudah menerima informasi dan mempertimbangkannya dari berbagai perspektif. Meskipun tidak mudah, kebiasaan berpikir kritis akan mempermudah proses ini.
3. Meminimalkan kemungkinan salah persepsi
4. Pemilih pemula rentan terhadap salah persepsi, terutama terkait isu politik saat pemilu. Dengan berpikir kritis, mereka dapat membedakan antara persepsi yang benar dan yang salah melalui analisis dan kritik.
5. Tidak mudah ditipu
6. Berpikir kritis memungkinkan pemilih pemula untuk berpikir secara rasional dan berbasis fakta. Mereka akan menganalisis informasi sebelum mengaitkannya dengan fakta yang ada, sehingga tidak mudah terjebak oleh berita hoaks yang beredar (Prameswari et al., 2024).

Simpulan

Literasi digital tentang politik saat ini sangatlah penting untuk dapat meningkatkan kapabilitas *critical thinking* pemilih pemula. Terutama Indonesia yang merupakan negara demokrasi, pemilih pemula sangatlah penting untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan seputar ilmu politik. Di Indonesia sendiri ada beberapa platform digital yang bisa dijadikan sarana untuk bisa meningkatkan literasi digital tentang politik, diantaranya ada Instagram, X, Tiktok, dan lain-lain. Di Instagram ada beberapa *account-account* yang bisa diikuti oleh pemilih pemula untuk bisa menambah wawasan tentang politik yaitu Narasi Newsroom, Tirto.id, KPU Republik Indonesia, Kompas.com dan lain-lain. Dengan memperbanyak literasi digital tentang politik di saluran literasi digital yang terpercaya, hal itu dapat mengasah skill berpikir kritis pemilih pemula tentang politik. Selain itu ada juga beberapa upaya untuk bisa meningkatkan literasi digital seperti dengan mengembangkan kesadaran atau keterbukaan informasi, memperkaya diri dengan pengetahuan, membandingkan informasi satu dengan dengan yang lain untuk disaring agar tidak salah persepsi, mempertimbangkan pendapat pribadi apakah sudah rasional dan masuk akal atau belum, membiasakan budaya verifikasi dan proaktif dalam mengoreksi misinformasi agar tidak meluas dan menimbulkan kerisauan di kemudian hari.

Referensi

- Anshori Akhyar, Rudianto, & Izharshyah Jehan Ridho. (2023). Pemahaman Literasi Politik Pemilih Pemula dalam Upaya Pencegahan Informasi Hoax Pemilu 2024. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*. <https://doi.org/10.30596/ji.v7i2.14727>
- Arizal, O., I*, B., Rahmat, H. K., Said, A., Basri, H., Dadang, D., Rajab, A., & Nurjannah, N. (2021). Urgensi Literasi Digital dalam Menangkal Radikalisme pada Generasi Millennial di Era Revolusi Industri 4.0. *Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 126–133. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v23i1.1698>
- Asbari, M., & Prasetya, A. B. (2021). Managerial Coaching: Rahasia Membangun Kinerja, Komitmen Tim dan Modal Psikologis Guru. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(1), 490–506. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v5i1.1248>
- Budiarjo Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Huljanna, Y. M., & Ikhsan. (2022). Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kecamatan Johan Pahlawan. *Independen*, 3(2).
- Komisi Pemilihan Umum RI. (n.d.). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih*.
- Lisa, A. P., Panca, A. P., Nurul, W. H., & Nata, A. M. (2019). *Demokrasi Indonesia*.
- Musticho, A. W., Salsabilla, I. A., Laila, R., & Sari, M. A. (2023). Peran Pemilih Pemula melalui Ruang Digital dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum 2024. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2), 169–186. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i2.271>
- Pauziah, N., & Muthiah, T. (2023). Hubungan Antara Literasi Digital dengan Kemampuan Berpikir Kritis Generasi Z. *Bandung Conference Series: Communication Management*, 3(2), 660–664. <https://doi.org/10.29313/bcscm.v3i2.7851>
- Prameswari, W., Suharno, & Sarwanto. (2024). *The Role of Literacy in the Development of Critical Thinking Abilitie Oktariani (1) & Evri Ekadiansyah (2)*. 1(1), 23–33. www.jurnalp3k.com/index.php/J-P3K/index
- Pulungan, M. C., Rahmatunnisa, M., & Herdiansah, A. G. (2020). STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI

- PEMILIH PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019. *POLITEA: JURNAL POLITIK ISLAM*, 3(2).
- Rasyid, F.A. (2023). *MEMBANGUN LITERASI POLITIK MELALUI PENDIDIKAN UNTUK PEMILU YANG BERMARTABAT*.
- Rianto, P., Studi, P., Komunikasi, I., Psikologi, F., & Budaya, S. (2019). LITERASI DIGITAL DAN ETIKA MEDIA SOSIAL DI ERA POST-TRUTH. In *Jurnal Ilmu Komunikasi* (Vol. 8, Issue 2).
- Suryani, C., Wiryadigda, P., Marwa, M., Islam, U., & Lirboyo, T. (2023). EFEKTIFITAS PERIKSA FAKTA DALAM MENINGKATKAN BERPIKIR KRITIS GEN Z. *JIVA: Journal of Behaviour and Mental Health*, 4(2), 158–172. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIVA/index>
- Tokan Pureklolon, T. (2021). EKSISTENSI BUDAYA POLITIK DI INDONESIA: SEBUAH KAJIAN. In *Jurnal Communitarian* (Vol. 3, Issue 1).
- Wahyuti, T., & Si, M. (2019). *URGENSI LITERASI MEDIA DIGITAL BAGI PEMILIH PEMULA DALAM MENGHADAPI PEMILU 2019* (Vol. 01). <https://www.liputan6.com/news/read/3645747/kemendagri-usul-kpu->
- Wibawa, S. (2022). Masalah-masalah yang Muncul dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. In *Jurnal Serunai Ilmu Pendidikan* (Vol. 8, Issue 2).
- Rizki Sabrina, A. (2018). *LITERASI DIGITAL SEBAGAI UPAYA PREVENTIF MENANGGULANGI HOAX*. In *COMMUNICARE : Jurnal Of Communication Studies* (Vol. 5, Issue 2).